

## **Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021**

**Tety Lensiana Mandua, Camelia L. Numberi, Simson Werimon,  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Papua**

### Article History:

Received: December 7, 2022

Accepted: January 2, 2023

\*Corresponding Author

E-mail:

[amelianumberi536@gmail.com](mailto:amelianumberi536@gmail.com)

### **Abstract**

*This study uses financial ratio analysis to evaluate the effectiveness of the management of the Wondama Bay regional revenue and expenditure budget for 2017–2021. Descriptive qualitative research is such. The report on the realization of the Teluk Wondama Regency APBD for the 2017–2021 period as a secondary data source, and documentation as a data collection method. Based on the findings of the financial ratio analysis, the overall performance of the Wondama Bay Regency APBD Manager for the 2017-2021 period is as follows: (1). Financial performance analysis Unexpected differences or smaller differences occur in revenue growth. (2). The level of decentralization is still quite low. (3) Regional financial independence is still quite low. (4). Still not effective is effectiveness. (5). Efficiency is now experiencing efficiency.*

**Keywords: APBD, Financial Ratio Analysis, Local Government Performance**

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Teluk Wondama tahun 2017–2021.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah semacam itu. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017–2021 sebagai sumber data sekunder, dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data.

Berdasarkan hasil temuan analisis rasio keuangan, secara keseluruhan kinerja Pengelola APBD Kabupaten Teluk Wondama periode 2017–2021 adalah sebagai berikut: (1). Analisis kinerja keuangan Perbedaan yang tidak terduga atau perbedaan yang lebih kecil terjadi pada pertumbuhan pendapatan. (2). Tingkat desentralisasi masih cukup rendah. (3) Kemandirian keuangan daerah masih cukup rendah. (4). Masih belum efektif adalah efektivitas. (5). Efisiensi kini mengalami efisiensi.

**Kata Kunci: APBD, Analisis Rasio Keuangan, Kinerja Pemerintah Daerah**

## **PENDAHULUAN**

Kepentingan nasional dan negara tunduk pada kontrol dan manajemen pemerintah. Tujuan utama pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dengan menawarkan layanan yang nantinya dapat ditingkatkan. Menurut Muhibtari (2014), kemampuan suatu daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada seberapa baik pemerintah mengelola keuangannya.

Adapun untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikatornya adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusi terintegrasi dari banyak faktor, antara lain investasi, pemberdayaan pendapatan asli daerah (PAD), inflasi, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pemberian Otonomi Khusus (otsus) merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah untuk provinsi Papua dan provinsi Papua Barat sejak era reformasi pada tahun 2001. Hal ini tercipta dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No. 21 tahun 2001 dan UU No. 35 tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat yang diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat di wilayahnya.

Berlakunya UU Otonomi Khusus secara langsung menandakan adanya transfer kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri transfer kekuasaan meliputi 4 (empat) sektor prioritas yaitu : Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan 33 tahun 2004 telah menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan begitu banyak perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan pusat dan daerah, khususnya di dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang di kenal sebagai era otonomi daerah (Yuliana 2013).

Sejak ditetapkan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelolah keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintah yang baik yaitu Transparansi, Akuntabilita, Partisipasi.

Menurut Mardiasmo (2006).Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Menurut Mardiasmo (2006).Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawabankan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Sedarmayanti (2009).Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.

Menurut Soepomo (2000) *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban dan berakuntabel terhadap publik secara prosional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Menurut Bank Dunia (world bank) *Good Governance* adalah

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menurut UNDP *Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara sektor swasta dan masyarakat prinsip Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Supremasi Hukum .

Kinerja Keuangan merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menejer Sektor Publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja keuangan suatu daerah dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelumnya untuk mengkaji kinerja keuangan suatu daerah. Untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan analisis rasio terhadap realisasi APBD.

Penilaian kerja, khususnya yang menentukan apakah program atau kegiatan organisasi tertentu berhasil atau tidak, didasarkan pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan karena tiga alasan. Pertama, tujuan pengukuran sektor publik adalah untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Kedua, keputusan dan alokasi sumber daya didasarkan pada metrik Kinerja Sektor Publik. Kelembagaan, ketiga.

Menganalisis Kinerja Pemerintah dalam Mengelola Keuangan Daerahnya dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode ke periode berikutnya sehingga dapat diketahui trennya. Efektivitas dan efisiensi realisasi pendapatan daerah, besaran kegiatan pemerintah yang membelanjakan pendapatan daerah, dan sejauh mana kemandirian keuangan pemerintah daerah satu sama lain, semuanya dapat ditentukan dengan analisis rasio keuangan. APBD (Tri Kusmiati 2019).

Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan otonomi daerah. Desentralisasi sistem pemerintahan di Kabupaten Teluk Wondama sebagai akibat dari otonomi daerah ini mengharuskan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang bertugas mengawasi pembangunan dan pelayanan masyarakat, guna menentukan layak atau tidaknya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Bahrin Assidiqi (2014), Meski jumlah ketergantungan kepada pemerintah federal masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien, kinerja keuangan pendapatan daerah dapat dinilai positif. Demikian pula dengan kinerja keuangan belanja daerah yang positif meskipun distribusi belanja operasional dan belanja modal tidak merata. Begitu pula yang dikemukakan oleh Mochammad Faishal Hakim (2018). Bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat mempengaruhi kinerja keuangan pendapatan daerah.

### **Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan salah satu dari bentuk desentralisasi pemerintahan (pembagian kekuasaan) yang pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh (HAW 2004).

Nurcholis (2007). Hak warga negara untuk mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan urusan mereka sendiri dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dikenal sebagai otonomi daerah. Demikian pula, daerah otonom didefinisikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan”. keadaan Rep." dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan kota merupakan dua contoh daerah otonom (local self government). Perhatikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Daerah, Kabupaten.

Kabupaten dan kota akan didesentralisasi menggunakan ide ini, sehingga kedua daerah tersebut memperoleh otonomi penuh (Nurcholis 2007). Menurut pendapat yang dikemukakan di atas, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kabupaten dan kota, untuk mengurus, menguasai, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Mengikatnya

### **Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Tujuan otonomi daerah adalah untuk menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan memberikan kepada daerah kendali atas segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang ini (HAW 2007). Kesejahteraan masyarakat meningkat di daerah yang memiliki kekuatan untuk menetapkan kebijakan daerah dan menawarkan layanan. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah diperlukan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah secara profesional dan berkeadilan, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berimbang antara dana pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, berikut prinsip otonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh (Rozali 2007):

1. Prinsip Otonomi Luas
2. Prinsip Otonomi Nyata
3. Prinsip Otonomi Yang Bertanggungjawab

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Sebuah peraturan daerah mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan daerah tahunan yang dirundingkan dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD (Pemdagri No. Tahun 2006). Akibatnya, APBD berfungsi sebagai alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik

yang dicapai melalui berbagai kegiatan dan program, dengan manfaat yang paling dirasakan masyarakat pada saat-saat tertentu.

Pengelolaan Keuangan dan APBD merupakan salah satu bidang penting pemerintah daerah yang perlu diatur secara ketat (Mardiasmo 2002). Alat kebijakan utama bagi pemerintah daerah dalam APBD adalah Anggaran Pokok, yang berperan penting dalam upaya peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah harus digunakan sebagai alat untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran, untuk membuat keputusan dan merumuskan rencana, untuk otorisasi pengeluaran masa depan, dan sebagai cara untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan di berbagai divisi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawas
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilitas

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Situasi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh bisnis pelaporan dirinci dalam laporan keuangan, yang merupakan laporan terorganisir. Laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang posisi keuangan entitas pelapor, realisasi saldo anggaran, surplus anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang membantu dalam membuat dan menilai keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk menyampaikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, khususnya:

1. Jelaskan keadaan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah dalam perekonomian.
2. Mengungkapkan setiap perubahan pada posisi sumber daya keuangan, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
3. Memberikan rincian tentang asal, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
4. Memberikan informasi realisasi anggaran yang sesuai.
5. Menjelaskan sumber pendanaan entitas pelapor dan prosedur manajemen arus kas.

6. Jelaskan bagaimana pemerintah dapat membiayai pelaksanaan inisiatif pemerintah.
7. Rincian penawaran yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas pelapor untuk membayar aktivitasnya.

Selain melayani tujuan tertentu, laporan keuangan juga melayani fungsi prediktif dan prospektif. Mereka menawarkan data yang berguna untuk meramalkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan oleh operasi yang berkelanjutan, dan risiko dan ketidakpastian yang terlibat. Selain itu, pelaporan keuangan memberikan detail kepada pengguna tentang:

1. Pernyataan apakah sumber daya dibeli dan digunakan dalam anggaran yang dialokasikan
2. Bukti bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan aturan, termasuk pembatasan anggaran yang ditetapkan oleh DPR atau DPRD

### **Komponen Laporan Keuangan Pokok**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu unsur dalam Laporan Keuangan Pokok.

Pemerintah federal atau daerah yang menunjukkan kekuasaan atas APBN atau APBD mengumumkan operasi keuangannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran memberikan ringkasan tentang asal-usul, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah pusat atau daerah dalam periode pelaporan tertentu. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya memuat komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Pendapatan – LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/deficit-LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Besarnya pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategisnya disebut kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi merupakan akibat langsung dari keberhasilan program atau kebijakan pemerintah.

- 1) Indikator Masukan
- 2) Indikator Proses
- 3) Indikator Keluaran

- 4) Indikator Hasil
- 5) Indikator Manfaat
- 6) Indikator Dampak

### **Analisis Kinerja Pengelolaan APBD Pemerintah Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan tiga bagian, (Mahmudi 2010) di dalam (Assidiqi 2014) yaitu :

### **Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah**

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dapat dilihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Karena apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah akan dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dengan cara sebagai berikut :

#### **1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif karena cenderung (trend) meningkat sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadinya penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Pertumbuhan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya harga minyak, kurs rupiah, dan lain-lain.

#### **2) Derajat Desentralisasi**

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelolah pendapatan. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fisikal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fisikal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian tim fisopol UGM menggunakan skla interval sebagaimana terlihat sebagai berikut (Wulandari 2001),

**Tabel 1. Skalah Derajat Desentralisasi Fiskal**

Persentase (%)	Kemampuan keuangan daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-40,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Wulandari, 2001

**3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini menunjukan pemerintah daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Muhmadi 2007) di dalam (Marizka 2009).

**Tabel 2. Pola Hubungan Dan Kemampuan Daerah**

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0,% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : (Abdul Halim 2007) didalam (Adhiantoko 2013)

- ❖ Pola Hubungan Instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih domina dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- ❖ Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campuran tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- ❖ Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- ❖ Pola Hubungan Delegatif, yaitu campuran tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**4) Rasio Efektifitas**

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen.

**Tabel 3. Tabel Rasio Efektivitas PAD**

Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2016



### 5) Rasio Efisiensi

Rasio ini sangat berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaiknya jika melebihi dari 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

**Tabel 4. Rasio Efisiensi**

Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	< 60%

Sumber: Mahmudi, 2016.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan pengumpulan data atau keterangan dari pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten teluk wondama periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan kemudian untuk mencari sumber teori serta pelaksanaannya di peroleh dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

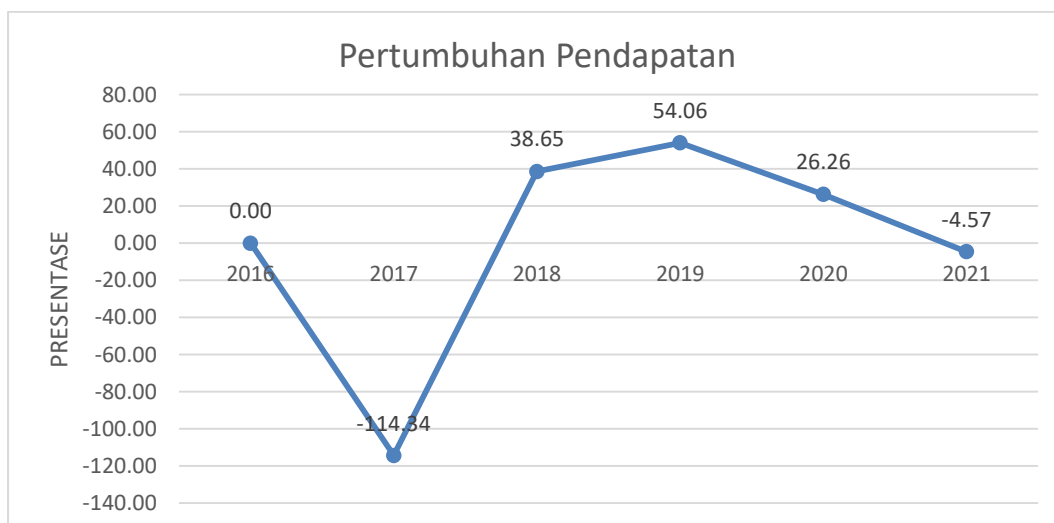
##### 1. Rasio Pertumbuhan

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{RpXn - RpXn(n - 1)}{RpXn - 1} \times 100\%$$

**Tabel 5. PAD Kabupaten Teluk Wondama Periode Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan (%)
1	2016	16.021.922.743	
2	2017	7.474.875.366	-114,34
3	2018	12.183.560.218	38,65
4	2019	26.517.750.411	54,06
5	2020	35.961.078.195	26,26
6	2021	34.390.233.810	-4,57

Berikut ini merupakan Grafik Pertumbuhan Kabupaten Teluk Wondama dari Periode 2017-2022, sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Teluk Wondama**

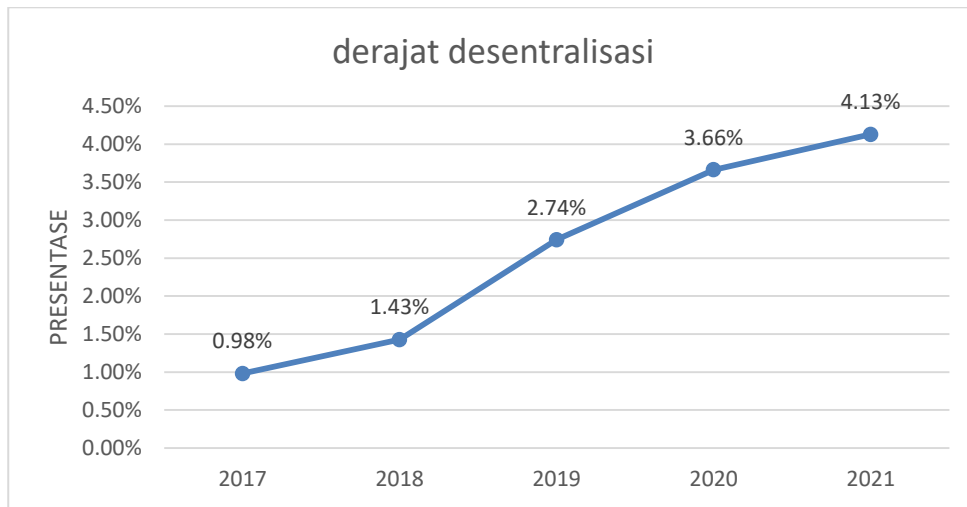
**2. Rasio Derajat Desentralisasi**

$$Rasio\ Derajat\ Desentralisasi = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

**Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017 – 2021**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentasi (%)	Keterangan
1	2017	7.474.875.366	761.810.519.371	0,98 %	Sangat Kurang
2	2018	12.183.560.218	852.864.167.118	1,43%	Sangat Kurang
3	2019	26.517.750.411	967.042.585.661	2,74%	Sangat Kurang
4	2020	35.961.078.195	981.663.298.955	3,66%	Sangat Kurang
5	2021	34.390.233.810	832.891.870.202	4,13%	Sangat Kurang

Berikut ini merupakan grafik Derajat Desentralisasi Kabupaten Teluk Wondama Dari Periode 2017- 2022, sebagai berikut:



**Gambar 2. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Teluk Wondama**

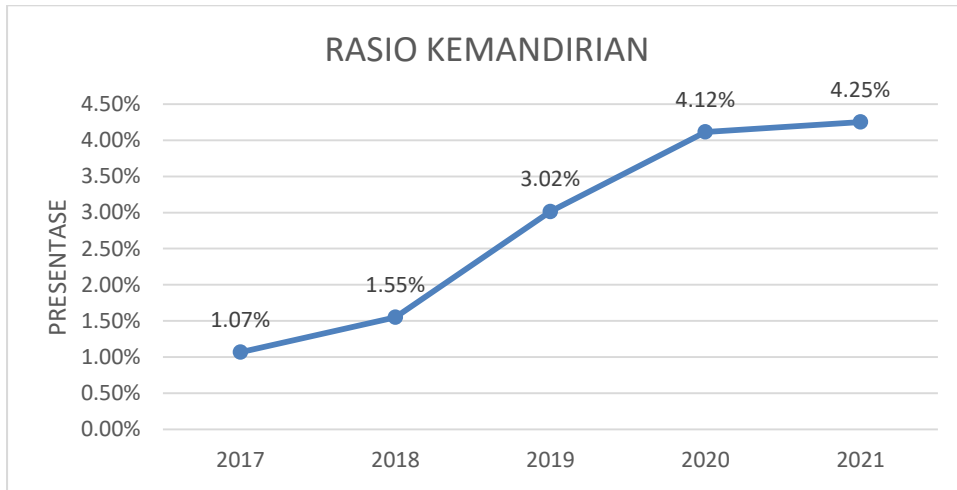
**3. Rasio Kemandirian**

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{(pendapatan\ transfer + Pinjaman\ daerah)} \times 100\%$$

**Tabel 7. Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah pendapatan transfer ditambah pinjaman daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode tahun 2017 – 2021**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pend.transfer + Pinjaman daerah	Persentasi (%)	Keterangan
1	2017	7.474.875.366	700.982.148.166	1,07 %	Rendah Sekali
2	2018	12.183.560.218	785.430.165.463	1,55%	Rendah Sekali
3	2019	26.517.750.411	879.295.198.769	3,02%	Rendah Sekali
4	2020	35.961.078.195	873.496.480.242	4,12%	Rendah Sekali
5	2021	34.390.233.810	808.570.032.090	4,25%	Rendah Sekali

Berikut ini merupakan grafik Kemandirian kabupaten Teluk Wondama dari periode 2017-2022, sebagai berikut:



**Gambar 3. Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Teluk Wondama**

**4. Rasio Efektivitas**

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

**Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017 – 2021**

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)	Keterangan
1	2017	58.362.600.000	7.474.875.366	12,81%	Tidak Efektif
2	2018	34.272.783.314	12.183.560.218	35,55%	Tidak Efektif
3	2019	45.965.226.062	26.517.750.411	57,69%	Tidak Efektif
4	2020	47.116.751.332	35.961.078.195	76,32%	Tidak Efektif
5	2021	57.673.785.924	34.390.233.810	59,63%	Tidak Efektif

Berikut ini merupakan grafik Efektivitas Kabupaten Teluk Wondama Dari Periode 2017-2022, sebagai berikut:



**Gambar 4. Grafik Rasio Efektivitas Kabupaten Teluk Wondama**

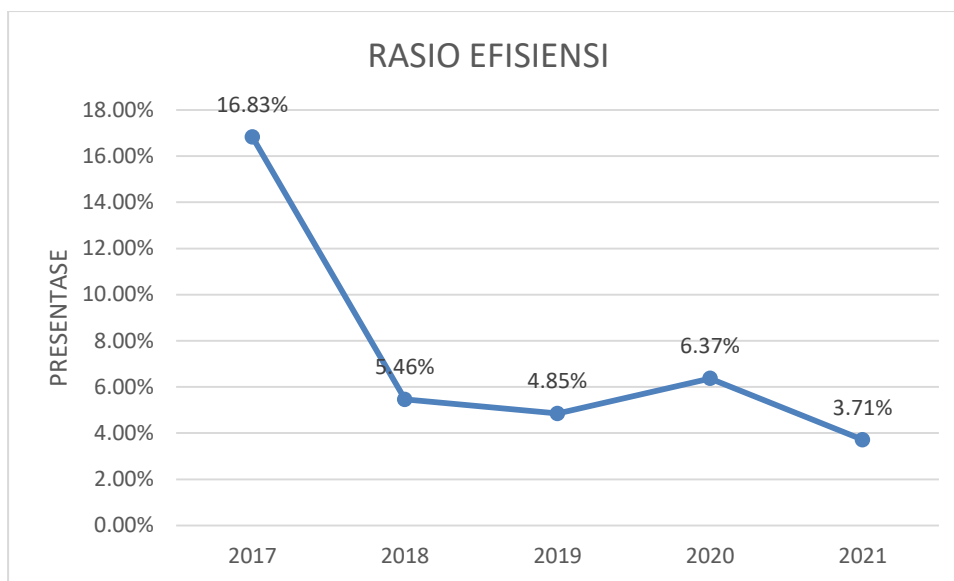
**5. Rasio Efisiensi**

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 9. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode tahun 2017 – 2021**

No	Tahun	Biaya pemungutan PAD	Realisasi PAD	Persentasi (%)	Keterangan
1	2017	1.258.184.000	7.474.875.366	16.83%	Efisien
2	2018	665.041.000	12.183.560.218	5.46%	Efisien
3	2019	1.286.276706	26.517.750.411	4.85%	Efisien
4	2020	2.290.189.500	35.961.078.195	6.37%	Efisien
5	2021	1.274.286.645	34.390.233.810	3.71%	Efisien

Berikut ini merupakan grafik Efisiensi Kabupaten Teluk Wondama Dari Periode 2017- 2022, sebagai berikut:



**Gambar 5. Grafik Rasio Efisiensi Kabupaten Teluk Wondama**

**Pembahasan**

**1. Rasio Pertumbuhan**

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah, kinerja keuangan Kabupaten Teluk Wasior mengalami pertumbuhan secara positif dan negatif. Jika dilihat dalam Rasio Pertumbuhan di atas selama 5 (lima) tahun terakhir dari periode 2017 – 2021. Untuk pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar -114,34 % dikarenakan tidak adanya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana tidak terjadi Realisasi PAD untuk tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Namun hal ini tidaklah bertahan lama karna di tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 4,57% disebabkan karna berkurangnya penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah dan ditambah dengan adanya pandemik covid -19 menyebabkan berkurangnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Teluk Wondama.

**2. Rasio Derajat Desentralisasi**

Grafik diatas menunjukkan hasil dari Derajat Desentralisasi dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan mulai dari 0,98% sampai 4,13%. Namun peningkatan tersebut tidaklah signifikan dari tahun ke tahun. Dimana nilainya masih jauh di bawah dari 10 % sehingga termasuk dalam katagorikan sangat kurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Teluk Wondama belum mampu dalam meningkatkan PADnya untuk dapat digunakan membiayai atau mencukupi kegiatan daerah.

**3. Rasio Kemandirian**

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama 2017 sampai dengan 2021 masih sangat rendah yaitu berada di skala 0%-25%. Sekalipun dari tahun 2017 ke 2021 mengalami peningkatan namun hasilnya masih berada

dibawah 25%. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama masih sangat tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. hal ini dikarenakan pengelolaan PAD masih sangat kurang untuk membiayai pembanguana daerah.

#### **4. Rasio Efektivitas**

Berdasarkan Hasil perhitungan grafik di atas menunjukkan bahwa tingakat efektifitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah masih kurang baik karena hasil yang diperoleh belum mencapai angka 100% sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi PAD daerah lebih kecil dari target yang ditetapkan. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam mengumpulkan PAD belum efektif karena hasil yang diperoleh belum mencapai angka 100%. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama harus meningkatkan kinerja dalam mengelola PAD agar dapat mencapai efektifitas pajak daerah.

#### **5. Rasio Efisiensi**

Berdasarkan hasil grafik di atas Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Dari Tahun 2016-2021 dapat di katagorikan efesiensi karena berada di bawa 60%. Karna tidak cocok dengan rasio yang lain sekalipun efisien tetap belum tepat untuk dikategorikan melampaui target PAD.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

- Kinerja Keuangan Kabupaten Teluk Wondama Dari Tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi dimana mengalami peningkatan dan penurunan pada penerimaan pendapatan asli daerah. Hal in disebabkan Karena pemerintah belum maksimal dalam melakukan pengeloaan sumber-sumber pendapatan daerahny dengan baik.
- Kinerja Keuangan Kabupaten Teluk Wondama jika dilihat dari tahun 2017-2021 Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikatagorikan sangat kurang dimana nilainya masih jauh dibawa 10% sehingga pemerintah kabupaten teluk wondam belum mampu untuk meningkatkan PAD
- Kinerja Keuangan Kabupaten Teluk Wondama jika dilihat Dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat kurang karena masih berada di bawa 25%. Sehingga kabupaten teluk wondama masih bergantung terhadap dana yang di transfer dari pusat dan pinjaman daerah untuk tahun 2017-2021
- Kinerja Keuangan Kabupaten Teluk Wondama dari Tahun 2017-2021 jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi dapat dikatakan efisien tetapi tidak efektif.

#### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama harus meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerahnya dalam mengelola pendapatan. Sehingga pemerintah dapat mengupayakan peningkatan pada pendapatan asli daerah dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat/provinsi. Caranya bisa melakukan efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi

salah satu sumber pendapatan dari PAD itu sendiri. Agar tidak terjadi penyimpangan, pemerintah juga harus melakukan pengawqasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Tetapi pemerintah juga harus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola kedua pos yang lain yaitu hasil pengelola kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan begitu pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat/ provinsi.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga harus meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam mengelola belanja. Sehingga terus menggunakan anggaran belanja dengan efisien dalam melakukan belanja operasi terhadap program-program dari pemerintah daerah tetapi juga terhadap belanja modal dalam pelayanan kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Assidiqi, Bahrun. 2014, "*Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*". Universitas Negeri Yogyakarta
- Fitriah Agustin. (2007). "Pengukuran Kinerja Perintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- H.A.W Wijaya. 2007 *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawati Ariana, dkk. "*Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*". Universitas Mulawarman
- Jusmawati. 2011. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makassar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- M. Faqihudin. "*Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik*". Universitas Panca Sakti Tegal
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE-UGM.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: And.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Masita, Machmud, dkk. 2014, "*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*" Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mhd Karya Satya Azhar. (2008). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Muhibtari, Nabila, Astriana. 2014, "*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2008-2012*". Universitas Negeri Yogyakarta



- Nurcholis, Hanif. 2007, *Teori dan Prakrek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Nurlan Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rita Engleni. (2001). “*Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan daerah Kota Padang*”. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rozali, Abdullah. 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslina Nadeak. (2003). *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma
- Sadeli, M, Lili. 2002, *Dasar-dasar Akuntansi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. BANDUNG: ALFABETA
- Syafri, Sofyan, Harahap, Syafri. 2008, *Analisis Kritis Dan Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tyas Nurulafifah. (2012). “*Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010*”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah.
- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik Vol.5 No. 2 Novenber
- Yuliana. 2013, “*Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)*” Universitas Muhammadiyah Surakarta